

LAPORAN
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



PRO POOR BUDGETING,
ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN
BOJONEGORO UNTUK WARGA MISKIN

Tim Peneliti:

Muhammad Miftahul Huda, MA, Ana kumalasari, M.Si, Sofitasari

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2023/2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : *Pro Poor Budgeting; Analisis Kebijakan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro*
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Muhammad Miftahul Huda, MA.
 - b. NIDN : 0720058007
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : miftahjatim@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Anggaran Daerah, Kebijakan Publik, Manajemen Publik
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama (Dosen) : Ana kumalasari, M.Si
 - b. NIDN : 0720089402
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : anakumalasary@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Sosial Humaniora
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Sofitasari
 - b. NIM : 21632011038
 - c. Program Studi : Administrasi Publik
 - d. E-mail : Sofita227@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan :
4. Jangka Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 12 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601



Muhammad Miftahul Huda, MA.
NIDN. 07 0512 7404

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan proposal penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Proposal penelitian ini berjudul: *Pro Poor Budgeting; Analisis Kebijakan Anggaran Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro*. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu Tridarma Perguruan Tinggi yaitu penelitian.

Kami menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka proposal hingga proses penelitian ini tidak akan bisa terselesaikan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pembuatan proposal penelitian ini. Mulai dari Rektor Universitas Bojonegoro, LPPM Universitas Bojonegoro, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bojonegoro, dan para pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Akhir kata, kami berharap Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini membawa manfaat bagi semua belah pihak.

Bojonegoro, 12 juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Landasan Teori	3
2.1.1 Kemiskinan.....	3
2.1.2 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	7
2.1.3 <i>Pro Poor Budgeting</i>	10
2.2 Penelitian Terdahulu	11
2.3 Kerangka Konsep Penelitian	14
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	17
3.2 Lokasi Penelitian	17
3.3 Sumber data dan informan	18
3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	19
3.5 Analisa Data	19
BAB IV BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	20
4.1 Anggaran Biaya	20
4.2 Jadwal Penelitian	20
BAB V TARGET LUARAN	21
DAFTAR PUSTAKA	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian	16
Gambar 5.1: Jurnal Ilmiah yang Dituju	21

ABSTRAKSI

Kemiskinan hingga saat ini masih jadi masalah utama pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Bojonegoro pada tahun 2022 12,21 persen. Angka ini masih jauh dari target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, sebesar 11,55 persen. Selain itu, kemiskinan Bojonegoro masih kelompok zona merah dikarenakan jumlah kemiskinannya masih di atas rata-rata kemiskinan nasional yakni sebesar 9,54 persen dan Provinsi Jawa Timur (Jatim) sebesar 10,38 persen.

Penelitian menggunakan teori *Pro poor Budgeting* model Fredolin Berek dkk. (2006) yang memberi tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (*by designed*) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

hasil penelitian menunjukkan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memiliki komitmen dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan memiliki target penurunan angka kemiskinan tahunan, namun target tersebut tidak tercapai, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kurang konsisten dalam membuat kebijakan pengelolaan APBD, belanja Gaji masih lebih tinggi dibandingkan belanja prioritas pengurangan kemiskinan, fokus utama pemerintah juga masih pembangunan infrastruktur. Anggaran APBD yang berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan dengan mengakselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin, dan alokasi anggaran untuk mengurangi belanja orang miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Rumah tangga miskin yang masih sangat kecil.

Keywords: *Pro Poor Budgeting*, Kebijakan Anggaran, Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Otonomi Daerah digulirkan 25 tahun yang lalu, bersamaan dengan dampak krisis ekonomi dan moneter yang terus berlanjut, ternyata perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat kearah peningkatan berjalan sangat lamban. Hal ini ditandai dengan kemiskinan di daerah yang masih cukup tinggi, tekanan pengangguran yang basih besar, rendahnya pendapatan perkapita masyarakat riil, tingginya jumlah anak putus sekolah, munculnya kasus gizi buruk, meningkatnya jumlah anak jalanan, pengemis serta penyakit-penyakit sosial masyarakat lainnya. Salah satu penyebab semua itu adalah kurangnya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat terutama kepada masyarakat miskin.

Kabupaten Bojonegoro sendiri, kemiskinan hingga saat ini masih jadi masalah utama pembangunan. Bersumber Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Bojonegoro pada tahun 2022 sekitar 12,21 persen. Angka ini masih jauh dari target penurunan kemiskinan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, sebesar 11,55 persen. Selain itu, kemiskinan Bojonegoro masih kelompok zona merah dikarenakan masih di atas rata-rata kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang masing-masing sekitar 9,54 persen dan 10,38 persen.

Angka kemiskinan yang relatif tinggi ini tentu saja memantik banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, jika mengingat dalam beberapa tahun terakhir APBD Bojonegoro terbilang cukup tinggi. Bahkan, tahun ini (tahun 2024), Kabupaten Bojonegoro berada di urutan ke-2 kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia, setelah Kabupaten Bogor yang berada di urutan pertama.

Tingginya APBD Kabupaten Bojonegoro dari potensi sumber daya alam (SDA) Kabupaten Bojonegoro yang melimpah. Baik sumber daya alam terbarukan (renewable) maupun sumber daya alam tidak terbarukan (non-renewable). Untuk sumber daya alam terbarukan, sekitar 40% wilayah Bojonegoro adalah kawasan hutan, dengan rincian sekitar 49 ribu hektar hutan

produksi dan sekitar 1 ribu hektar hutan lindung. Komoditas utama hutan produksi berupa kayu jati yang berkualitas unggul. Selain itu terdapat juga kayu mahoni dan lainnya.

Adapun sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan (non-renewable) yang dimiliki Bojonegoro adalah minyak dan gas bumi (migas). Saat ini Bojonegoro tercatat sebagai daerah penghasil migas terbesar di Indonesia. Sekitar 1/4 (seperempat) produksi minyak dalam negeri berasal dari lapangan migas yang ada di Bojonegoro. Terdapat 4 (empat) lapangan migas yang sudah berproduksi, yakni lapangan Banyu Urip dan lapangan Kedung Keris (KDK) di Blok Cepu; lapangan Sukowati di Blok Tuban; lapangan unitisasi gas Jambaran-Tiung Biru (JTBT); dan lapangan minyak tradisional sumur tua, Wonocolo-Kedewan.

Dari pengelolaan SDA migas yang ada di daerah tersebut, Bojonegoro mendapat aliran Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang cukup besar. Terlebih lagi saat produksi minyak di lapangan Banyu Urip, Blok Cepu yang telah memasuki masa puncak produksi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2018 hingga sampai saat ini. Bersumber DJPK Kemenkeu RI, pada tahun 2021 realisasi nilai DBH migas yang diterima Kabupaten Bojonegoro mencapai sekitar Rp2,13 Triliun, tahun 2022 meningkat jadi sekitar Rp2,6 Triliun, untuk tahun 2023 nilai DBH migas yang diterima sebesar Rp2,28 Triliun. Sementara untuk tahun 2024 ini diproyeksikan nilai DBH migas yang diterima sebesar Rp2,53 Triliun.

Besarnya nilai DBH migas yang diterima daerah pun berdampak signifikan pada kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2022 nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro (setelah perubahan) mencapai Rp7,03 triliun, menempatkan Bojonegoro di peringkat ke-2 kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia, tepat di bawah Kabupaten Bogor yang menempati urutan pertama. Peningkatan APBD Bojonegoro berlanjut pada tahun anggaran berikutnya. Tahun 2023 nilai APBD Kabupaten Bojonegoro (setelah perubahan) mencapai Rp7,9 Triliun. sementara di tahun 2024 ini nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro diproyeksikan mencapai Rp8,23 Trilyun.

Namun Besarnya potensi SDA migas dan APBD Kabupaten Bojonegoro yang cukup tinggi ini belum secara signifikan berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup warga masyarakat daerah. Bersumber Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, meski trennya menurun tingkat kemiskinan Kabupaten Bojonegoro masih sebesar 11,69 persen, menempati urutan tertinggi ke-11 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin mencapai 147,33 ribu jiwa, dengan indeks kedalaman kemiskinan yang terus meningkat sebesar 1,99 dan tingkat keparahan kemiskinan sebesar 0,48 sebagaimana yang dirilis BPS per Maret tahun 2024 ini.

Tabel 01



Sumber : Rilis BPS Bojonegoro 2024

Fenomena kemiskinan daerah kaya sumberdaya migas bukanlah hal baru. Sudah banyak hasil study yang menemukan fenomena sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan, korupsi, konflik sosial dan lainnya – terjadi di daerah-daerah kaya sumber daya migas. sebaliknya, tidak sedikit daerah-daerah yang tidak memiliki atau miskin sumber daya migas justru memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi serta tingkat kesejahteraan masyarakat lebih tinggi. Fenomena ini oleh banyak kalangan disebut sebagai kutukan sumber daya alam (the Resource curse).

Terry Lynn (2017) menyatakan bahwasanya kutukan sumberdaya alam tidak dapat ditimpakan pada minyak itu sendiri, sebab minyak hanya sekadar bahan kental berwarna hitam, melainkan pada ragam penanganan yang berkembang di sekitar eksploitasi minyak. Menurutnya, “kutukan sumberdaya alam” sesungguhnya merupakan sebuah fenomena politik/kelembagaan dan bukan ekonomi. Maksud fenomena politik/kelembagaan di sini: suatu fakta di

mana banyak pembuat kebijakan begitu lambat (atau tidak berkeinginan) untuk memahami.

Masih tingginya kemiskinan ini mengindikasikan kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Paradoks antara potensi sumber daya alam – terutama sumber daya migas – dengan permasalahan kemiskinan, dan besarnya jumlah penduduk miskin dengan indeks kedalaman kemiskinan serta tingkat keparahan kemiskinan di daerah Kabupaten Bojonegoro ini, tentu saja ini mengundang pertanyaan peneliti, mengapa angka kemiskinan daerah kaya sumber daya alam migas dan memiliki kemampuan belanja anggaran cukup besar ini masih relatif tinggi? Bagaimana para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan di daerah selama ini menangani persoalan kemiskinan? Bagaimana Dana Bagi Hasil Migas dan sumber daya alam lain yang menjadi pendapatan daerah dalam APBD dikelola?.

Anggaran seharusnya menjadi instrumen negara untuk menyelesaikan masalah publik khususnya kemiskinan. Karena pada dasarnya, konstitusi negara Indonesia mengamanatkan negara untuk menjaga orang-orang miskin. Sebagaimana yang tertulis pada pasal 34 ayat 1 UUD. Berangkat dari sini, maka penulis memandang perlu dilakukan analisis kebijakan anggaran pengentasan kemiskinan daerah. Sengaja peneliti hanya memfokuskan pada anggaran Dinas Kesehatan karena Dinas ini menjadi Leading sector atau ujung tombak dalam menyelesaikan pengentasan kemiskinan di daerah.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk kesenjangan yang disampaikan dalam sub bagian latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pro Poor Budgeting; Analisis Kebijakan Anggaran Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis dan mendeskripsikan Pro Poor Budgeting; Kebijakan Anggaran Pengentasan Kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Teoritik: Berkontribusi terhadap perkembangan teoritik dalam kajian *Pro Poor Budgeting* Kebijakan Anggaran Pengentasan Kemiskinan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam perspektif Administrasi Publik.
- b) Manfaat Praktis: Diharapkan dalam penelitian ini diperoleh gambaran atau best practice tentang *Pro Poor Budgeting* Kebijakan Anggaran Pengentasan Kemiskinan yang dapat digunakan oleh pemerintah atau pengambil kebijakan. Serta, bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kemiskinan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengartikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya.

BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Kebutuhan standar minimum digambarkan dengan garis kemiskinan (GK) yaitu batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan.

Batas pemenuhan kebutuhan minimum mengacu pada rekomendasi Widya Karya Nasional dan Gizi pada tahun 1978, yaitu nilai rupiah dari pengeluaran untuk makanan yang menghasilkan energi 2.100 kilo kalori per orang setiap harinya. Sedangkan kebutuhan non pangan mencakup pengeluaran untuk perumahan, penerangan, bahan bakar, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi, barang-barang tahan lama serta barang dan jasa esensial lainnya.

Soerjono Soekanto, ahli sosiologi hukum mendefinisikan kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kemiskinan menurut Kuncoro, (1997:102-103) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Definisi tersebut menyiratkan tiga pernyataan dasar, yaitu : (1) Bagaimana mengukur standar hidup; (2) Apa yang dimaksud dengan standar hidup minimum; dan (3) Indikator sederhana yang bagaimanakah yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit. Rumusan kemiskinan menurut Friedmann (1992) sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976.

Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut : (1) Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya); (2) Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan); (3) Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka ; (4) Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia; (5) Penciptaan lapangan kerja (employment) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

Sumodiningrat (1989: 26). menyatakan bahwa kemiskinan bersifat multidimensional, dalam arti berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan aspek lainnya, sedangkan Kartasasmita (1997: 234) mengatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pengangguran dan keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Lebih lanjut Kartasasmita mengemukakan bahwa masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Senada dengan yang dikatakan Friedmann (1992: 123) yang mengatakan bahwa kemiskinan sebagai akibat dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Gambaran kemiskinan dapat dilihat sebagai kelaparan, ketiadaan tempat berteduh, ketidakmampuan mendapatkan pengobatan secara medis, ketiadaan akses untuk bersekolah dan buta huruf, pengangguran, kekhawatiran tentang masa depan bahkan kehidupan pada suatu hari berikutnya. Potret kemiskinan lainnya adalah kehidupan tidak sehat yang disebabkan oleh air yang kotor, ketidakberdayaan, kehilangan aspirasi dan kebebasan. Kemiskinan yang dipahami memiliki konsep multidimensional mencakup seluruh indikator kesejahteraan, mempunyai banyak wajah, yang berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain.

Simatupang, 2003 mendefinisikan kemiskinan (poverty) merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh negara, terutama di negara berkembang seperti

Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.

Sementara itu Nasution (1996) berpendapat bahwa kemiskinan dibagi dalam dua kategori, yakni kemiskinan struktural dan alamiah. Kemiskinan struktural disebut juga sebagai kemiskinan buatan (*man made poverty*). Baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan buatan disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang mencakup tidak hanya tatanan organisasi tetapi juga mencakup masalah aturan yang ditetapkan. Kemiskinan buatan membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia. Sedangkan kemiskinan alamiah terjadi disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan sumberdaya alam, penggunaan teknologi rendah dan bencana alam.

Pada kondisi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam lemah/terbatas, peluang produksi relatif kecil atau tingkat efisiensi produksinya relatif rendah. Selain itu terdapat juga bentuk-bentuk kemiskinan yang sekaligus menjadi faktor penyebab kemiskinan (asal mula kemiskinan). Ia terdiri dari: (1) Kemiskinan natural, (2) Kemiskinan kultural, dan (3) Kemiskinan struktural (Kartasasmita, 1996: 235, Sumodiningrat, 1998: 67, dan Baswir, 1997: 23).

- a) Kemiskinan natural adalah keadaan miskin karena dari awalnya memang miskin. Kelompok masyarakat tersebut menjadi miskin karena tidak memiliki sumberdaya yang memadai baik sumberdaya alam, sumberdaya

manusia maupun sumberdaya pembangunan, atau kalaupun mereka ikut serta dalam pembangunan, mereka hanya menadapat imbalan pendapatan yang rendah. Menurut Baswir (1997: 21) kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut atau karena bencana alam. Kondisi kemiskinan seperti ini menurut Kartasasmita (1996: 235) disebut sebagai “Persistent Poverty” yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Daerah seperti ini pada umumnya merupakan daerah yang kritis sumberdaya alamnya atau daerah yang terisolir.

- b) Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau kelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budaya di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat seperti ini tidak mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan, tidak mau berusaha untuk memperbaiki dan merubah tingkat kehidupannya. Akibatnya tingkat pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang dipakai secara umum. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Baswir (1997: 21) bahwa ia miskin karena faktor budaya seperti malas, tidak disiplin, boros dan lain-lainnya.
- c) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu (Baswir, 1997: 21). Selanjutnya Sumodiningrat (1998: 27) mengatakan bahwa munculnya kemiskinan struktural disebabkan karena berupaya menanggulangi kemiskinan natural, yaitu dengan direncanakan bermacam-macam program dan kebijakan. Namun karena pelaksanaannya tidak seimbang, pemilikan sumber daya tidak merata, kesempatan yang tidak sama menyebabkan keikutsertaan masyarakat menjadi tidak merata pula, sehingga menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Menurut Kastasasmita (1996: 236) hal ini disebut “accidental poverty”, yaitu kemiskinan karena dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang

menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Masalah-masalah kemiskinan tersebut di atas menurut Nurkese (dalam Sumodiningrat. 1999: 150) sebagai suatu “lingkaran setan kemiskinan” yang meliputi enam unsur, yaitu : Keterbelakangan, Kekurangan modal, Investasi rendah, Tabungan rendah, Pendapatan rendah, Produksi rendah.

Dari berbagai pendapat di atas dapat dinyatakan bahwa fenomena kemiskinan umumnya dikaitkan dengan kekurangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan kemiskinan merupakan kondisi serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok (utama), yang disebabkan oleh akibat sampingan dari suatu kebijaksanaan yang tidak dapat dihindari, merupakan akar kemiskinan dan akan mengakibatkan ketidakberdayaan penduduk lapisan masyarakat bawah, sehingga membawa pada gejala kemiskinan yang bersifat multidimensional, karena dalam kenyataannya berurusan juga dengan persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik).

2.1.2 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara di dunia ini, maka “penghilangan kemiskinan dan kelaparan” pada 2030 menjadi “tulang punggung” dari tujuan agenda pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan yang menjadi tujuan utama Millennium Development Goals (MDGs) kembali menjadi tujuan utama dalam Sustainable Development Goals (SDGs).

Millennium Development Goals (MDGs) adalah sebuah paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan, diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit, dan perbaikan kualitas lingkungan telah dilakukan oleh negara-negara sejak 2001 hingga akhir 2015. MDGs bertujuan mengurangi kemiskinan, tetapi gagal memperhatikan dan mengatasi akar masalah kemiskinan. MDGs tidak secara khusus memperhatikan pentingnya mencapai tujuan perbaikan pembangunan ekonomi. MDGs kurang memperhatikan sifat holistik, inklusif, dan keberlanjutan pembangunan. Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator

MDGs, namun demikian masih terdapat beberapa indikator yang harus dilanjutkan dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

Dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Rio de Janeiro (Brasil) pada Juni 2012 dibahas agenda pembangunan berkelanjutan yang disebut Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. SDGs merupakan kelanjutan dan perluasan dari Millennium Development Goals (MDGs). SDGs menegaskan pentingnya upaya mengakhiri kemiskinan agar dilakukan bersama dengan upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menerapkan langkah kebijakan sosial untuk memenuhi aneka kebutuhan sosial (seperti pendidikan, kesehatan, proteksi sosial, kesempatan kerja), dan langkah kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim dan proteksi lingkungan.



Gambar 1 Sustainable Development Goals, Sumber : GTP, 2016

Berdasarkan gambar diatas SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target, yang meliputi aneka isu pembangunan berkelanjutan. Kemiskinan (Poverty) merupakan isu penting dalam tujuan SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di setiap tempat. Dalam inisiatif global ini, Indonesia juga merupakan negara yang ikut serta dalam menyukseskan SDGs terutama upaya dalam pengentasann kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidak mampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan,

air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Kemiskinan dalam konteks pengentasan kemiskinan dimaknai sebagai ketidakmampuan atau keterbatasan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup pada batas minimum kesejahteraan ekonomi. Manifestasi keterbatasan atau kurang mampuan adalah: (1) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi asupan kalori dan protein untuk bertahan hidup (2) keterbatasan/ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan sandang untuk hidup layak (3) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi kebutuhan biaya kesehatan (4) keterbatasan/ketidakmampuan dalam memenuhi biaya hidup (5) keterbatasan/ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang memiliki sarana minimal penunjang kesehatan.

Di dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya menyangkut ukuran pendapatan, melainkan karena menyangkut beberapa hal antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Penanggulangan kemiskinan daerah berarti mengalokasikan anggaran publik untuk mengurangi proporsi penduduk yang berada pada kondisi rentan di bawah garis kemiskinan atau kondisi hidup layak. Hal ini menyangkut politik anggaran, artinya penggunaan kekuasaan untuk menentukan "siapa menerima berapa" dan "melalui mekanisme yang seperti apa". Oleh karena itu pendekatan identifikasi penilaian program pro poor didasarkan pada perspektif kemiskinan dari sudut pandang sosial politik (Lehning, 2007).

Kabupaten Bojonegoro sendiri telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang menyebutkan bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi, agar penanggulangan kemiskinan berjalan optimal, efektif, efisien,

terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/359/KEP/412.013/2022 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang dimana terdapat suatu kolaborasi baik dari OPD Kabupaten Bojonegoro, Swasta, NGO, Akademisi, dan Masyarakat.

2.1.3 Pro Poor Budgeting

Sebagaimana diketahui, anggaran merupakan sebuah instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan. Sebab, kebijakan suatu pemerintah pasti membutuhkan sumber daya berupa alokasi anggaran yang tertuang dalam APBD. Anggaran harus mengakomodasi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ideal-nya, anggaran (APBD/APBDes) harus berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor budget). Apa itu anggaran pro poor?

Anggaran pro poor secara sederhana sering dimaknai anggaran yang memihak orang miskin, dan ini banyak diterjemahkan dalam artian luas: sebagai suatu praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.

Anggaran yang berpihak pada orang miskin menjadi sebuah keniscayaan, sebagai salah satu wujud implementasi fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Setidaknya ada tiga landasan hak bagi warga miskin menuntut hal ini, yaitu: hak asasi manusia, hak warga negara, hak ekonomi sosial dan budaya.

Hingga saat ini belum terdapat kesepakatan tentang konsep dari anggaran yang berpihak pada orang miskin. Jika dilihat dari kerangka demokrasi, anggaran berpihak pada orang miskin (pro poor budget) berproses secara partisipatif yang melibatkan partisipasi rakyat, dan secara substantif ia bersifat responsif dan berpihak kepada hak dan kepentingan orang miskin yang selama ini terpinggirkan dari kebijakan alokasi-distribusi anggaran.

Kelompok Kerja Pro Poor Budget misalnya, memberi pemahaman bahwa anggaran pro poor berarti anggaran yang memihak orang miskin atau dapat diterjemahkan pula sebagai praktik penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by design) ditujukan untuk membuat kebijakan, program, dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin.

Tidak jauh berbeda, Fredolin Berek dkk. (2006) memberi tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Atas dasar teori tersebut, secara umum anggaran yang berpihak pada orang miskin sering dimaknai sebagai anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dasar orang miskin. Konsep kebutuhan dasar sendiri diinterpretasikan sebagai:

- kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi, seperti makanan, tempat tinggal (shelter), dan pakaian.
- Essential services (pelayanan publik dasar) untuk konsumsi kolektif yang ditujukan kepada masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, transportasi publik, kesehatan dan fasilitas pendidikan.
- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada mereka.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang menghubungkan kebijakan pengentasan kemiskinan cukup banyak dilakukan, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun dan Judul	Rumusan Masalah/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
1	Eko Budi Santoso, Sutikno, Vely Kukinul Siswanto, Yuni Setyaningsih (2022) Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Intergrasi Program Antar OPD	Melihat strategi dalam pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan oleh instansi pemerintah daerah melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdasarkan aspek sosial dan aspek ekonomi menggunakan <i>tools fish-bone analysis, Focus Group Discussion dsb.</i>	Adanya pendekatan terintegrasi dan adanya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Bappeda melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan melibatkan setidaknya 12 OPD terkait. Adanya FGD menghasilkan 2 agenda utama yaitu melalui penjaminan sosial dan meningkatkan kapasitas ekonomi yang memerlukan kolaborasi antar OPD. Strategi <i>Food and nutrition Security</i> dan ODF menjadi platform utama untuk meningkatkan penjaminan sosial. Kolaborasi antar OPD mensinergikan 13 program dengan target dan sasaran yang berbeda.	Adanya persamaan topik penelitian yaitu terkait pengentasan kemiskinan dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.	Fokus penelitian terdahulu mengenai strategi yang menggunakan analisis <i>fishbone</i> dan <i>focus group discussion</i> sedangkan penelitian ini mengenai <i>coolabrotive governance</i> yang berfokus pada teori yang dipaparkan oleh Bryson, Crosby dan Stone. Lokasi penelitian terdahulu berada di Kabupaten Tuban sedangkan penelitian ini di Kabupaten Bojonegoro.
2	Rutiana D. Wahyuningseh, dkk (2019) Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam perspektif	Bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam perspektif <i>collaborative governance</i> dan pengimplementasian kebijakan.	Isu kemiskinan bersifat multidimensional dan kontekstual dan merujuk pada tantangan isu strategis SDG's. membahas kolaborasi dengan dunia usaha dalam kerangka anggaran CSR atau TJSLP, masyarakat	Topik penelitian yang digunakan sama yaitu mengenai penanggulangan kemiskinan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan	Fokus penelitian terdahulu mengenai <i>collaborative governance</i> yang berfokus pada teori Ansel dan Gash sedangkan penelitian ini mengenai

No	Penelitian Tahun dan Judul	Rumusan Masalah/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
	<i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> .		sipil, broker informasi penanggulangan kemiskinan.	adanya permasalahan yang sama terkait <i>collaborative governance</i> .	<i>collaborative governance</i> yang berfokus pada teori yang dipaparkan oleh Bryson, Crosby dan Stone (2006). Lokasi penelitian terdahulu berada di Kota Magelang sedangkan penelitian ini di Kabupaten Bojonegoro.
3	Didi Rasdi, Teguh Kurniawan (2019). Efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan : sebuah tinjauan literatur.	Permasalahannya ketiadaannya tujuan yang jelas maupun potensi kerugian lainnya dalam kemitraan antara pemerintah dan swasta yang berdampak pada efektivitas penanggulangan kemiskinan.	Kemitraan dijadikan untuk mengatasi kemiskinan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi kecil dan menengah, corporate social responsibility (CSR), program lainnya. Dalam mencapai efektivitas kemitraan sebagai pengembangan ekonomi dengan dimensi seperti tujuan dan strategi kemitraan, aktor yang terlibat, lokasi, waktu serta mekanisme kemitraan yang akan dijalankan. Dimensi lain yang dapat digunakan yaitu kesetaraan, inklusi sosial, dan pemberdayaan.	Topik penelitian yang digunakan sama yaitu mengenai apenanggulangan kemiskinan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya permasalahan yang sama terkait mengkolaborasi antara pemerintah dan swasta.	Fokus penelitian terdahulu mengenai efektivitas yang berfokus pada teori model kemitraan MqQuaid (2000) dan model berdasarkan tujuan (<i>purpose base framework</i>) menurut Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) sedangkan penelitian ini mengenai <i>collaborative governance</i> yang berfokus pada teori yang dipaparkan oleh Bryson, Crosby dan Stone (2006). Lokasi penelitian terdahulu berada

No	Penelitian Tahun dan Judul	Rumusan Masalah/ Fokus Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Peneliti	Perbedaan dengan Peneliti
					di Kota Pasuruan sedangkan penelitian ini di Kabupaten Bojonegoro.
4	Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, Abd. Rachim (2020) <i>Collaborative Governance</i> dalam Perspektif Administrasi Publik.	Bagaimana <i>collaborative governance</i> dalam perspektif administrasi publik dengan para pemangku kepentingan terlibat dalam kolaborasi penta helix?	Menghasilkan terkait kolaborasi <i>penta helix</i> dalam dua studi kasus. Konsep penta helix belum mampu menggambarkan secara komprehensif pemangku kepentingan yang terlibat. Peneliti merekomendasikan Hexa “Hexa Helix”. Sedangkan Tidak tercapainya cakupan ASI eksklusif di beberapa puskesmas di Kota Semarang disebabkan karena beberapa faktor internal atau predisposisi. Adanya self-efficacy merupakan faktor dominan tidak tercapainya target cakupan ASI eksklusif di Kota Semarang.	Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu menggunakan model kolaborasi <i>penta helix</i> sedangkan peneliti menggunakan model kolaborasi <i>hexa helix</i> , selain itu penelitian terdahulu menggunakan dua topik penelitian sedangkan peneliti hanya menggunakan satu topik penelitian.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2024)

2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep penelitian ini lahir untuk menjawab dua permasalahan utama. Pertama, Kemiskinan masih menjadi masalah utama Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan temuan awal peneliti, Angka kemiskinan yang relatif tinggi ini tentu saja memantik banyak pertanyaan dari berbagai kalangan, jika mengingat dalam beberapa tahun terakhir APBD Bojonegoro terbilang cukup

tinggi. Bahkan, tahun ini (tahun 2024), Kabupaten Bojonegoro berada di urutan ke-2, Kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia, setelah Kabupaten Bogor yang berada di urutan pertama. Kedua, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro yang menjadi Leading sektor utama OPD yang menangani kemiskinan dipertanyakan komitmennya dalam membuat kebijakan alokasi anggaran untuk pengentasan kemiskinan apalagi penurunan angka kemiskinan masih sangat rendah setiap tahunnya.

Kedua permasalahan di atas terjadi dikarenakan anggaran yang merupakan sebuah instrumen pemerintah dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, belum bisa mengakomodasi dan menjadi mediasi berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat khususnya keberpihakan alokasi anggaran kepada masyarakat miskin (pro poor budget).

Pro Poor Budgeting bertujuan untuk menganalisis sejauhmana komitmen Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro dalam membuat kebijakan anggaran yang berpihak pada rakyat miskin melalui tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

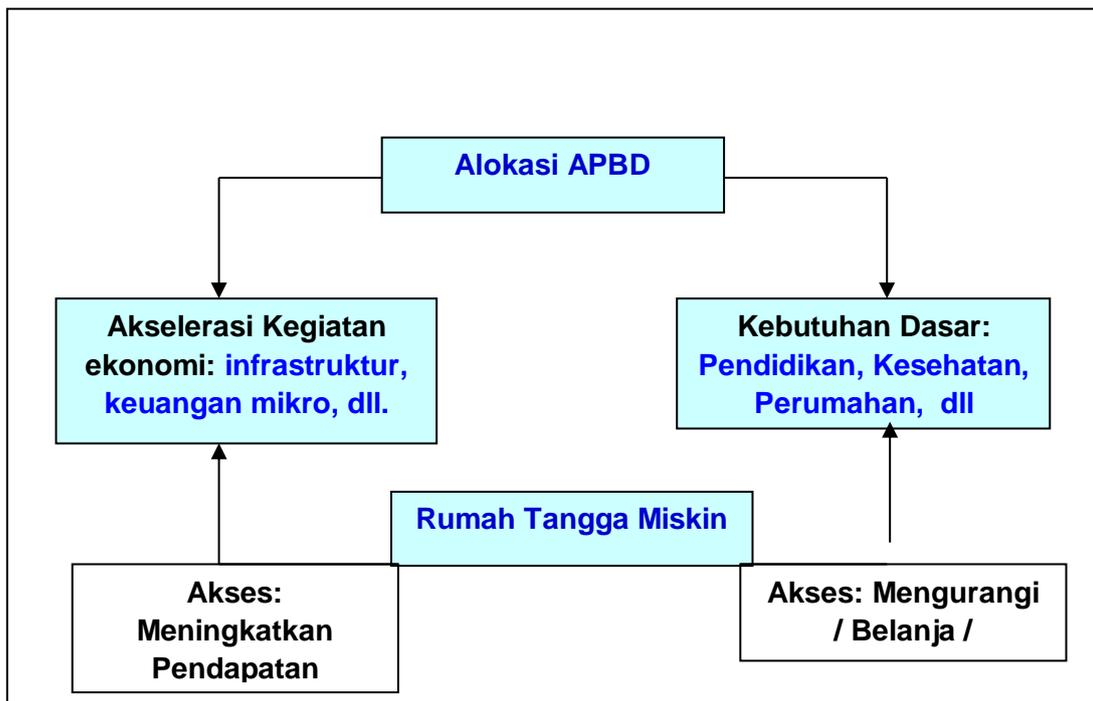
Dari hasil analisis Pro Poor Budgeting ini diharapkan dapat diperoleh sejauhmana anggaran Dinas Sosial berpihak dan responsif terhadap kebutuhan dasar orang miskin, melalui tiga konsep berikut:

- Kebutuhan minimum dari sebuah keluarga untuk konsumsi, seperti makanan, tempat tinggal (shelter), dan pakaian.
- Essential services (pelayanan publik dasar) untuk konsumsi kolektif yang ditujukan kepada masyarakat, yaitu ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, transportasi publik, kesehatan dan fasilitas pendidikan.

- Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada mereka.

Dengan demikian, kerangka penelitian dapat digambarkan dalam gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian Anggaran Pro Poor



Sumber: Data penelitian (Muhammad Miftahul Huda, 2024)

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Merujuk permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative) interpretif. Riset kualitatif mengandalkan data non-numerik dalam bentuk kata-kata, termasuk semua jenis analisis tekstual semacam itu sebagai analisis isi, percakapan, wacana, dan naratif (Jackson et al., 2007). Tujuan dan fungsi penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu makna tindakan manusia dengan mendeskripsikan karakteristik-karakteristik yang melekat atau esensial dari objek sosial atau pengalaman manusia (Denzin & Lincoln, 2000); (Denzin et al., 2006).

Kemudian, untuk menjelaskan terkait dengan jawaban yang ideal terhadap gambaran kebijakan anggaran yang memihak rakyat Miskin, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, analisis anggaran pro poor budgeting yang dikembangkan oleh Fredolin Berek dkk. (2006) melalui tiga kriteria anggaran pro poor: Pertama, suatu anggaran yang mengarah pada pentingnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada orang miskin. Kedua, praktik penyusunan dan kebijakan di bidang anggaran yang sengaja (by designed) ditujukan untuk membuat kebijakan, program dan proyek yang berpihak pada kepentingan masyarakat miskin. Ketiga, kebijakan anggaran yang dampaknya dapat meningkatkan kesejahteraan, termasuk juga terpenuhinya kebutuhan hak-hak dasar masyarakat miskin

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, dimana Dinas Sosial merupakan OPD yang sangat erat dengan kebijakan pengentasan kemiskinan

Penelitian dilakukan selama rentang waktu APBD Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2022-2024. Rentang waktu penelitian dibatasi tiga tahun terakhir,

3.3 Sumber data dan Informan

Pengambilan informan pada penelitian kualitatif, dengan berpijak pada masalah konten dan analisis interpretasi. Dengan cara ini, kriteria pengambilan informan menjadi terlihat (Merkens 1997: 102) dan harus dijamin kasus direpresentasikan dengan sebagai banyak segi mungkin. Misalnya, dalam organisasi tak semuanya diwawancarai harus berasal dari level sama di hierarki atau milik satu departemen, jika budaya organisasi sedang diselidiki (Ivey, 2011).

Selain itu, penelitian ini juga harus melibatkan informan pembanding atau kritis, yang terlepas dari manajemen. Untuk itu, peneliti bukan hanya mengambil informan dari Dinas Sosial selaku pembuat kebijakan. Melainkan juga akan mewawancarai NGO yang selama ini dikenal kritis terhadap kebijakan alokasi anggaran pemerintah. Mekanisme teknik sampling yang relevan dalam riset ini adalah dengan memakai informan bertujuan atau purposive sampling

Dalam mengambil informan, kriteria lain juga dapat berperan sebagian, seperti kualitas informan riset (Spradley 1979). Morse (1994: 228) menemukan karakteristik informan semacam ini, mencakup: (a) mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan penelitian; (b) mampu melakukan refleksi; (c) mereka pandai berbicara; (d) mereka punya waktu untuk diwawancarai; dan (d) mereka juga bersedia ambil bagian dalam penelitian (Flick, Uwe, et.al, 2004).

Untuk kedalaman data penelitian, penelitian akan melakukan triangulasi data dari informan dengan data-data skunder yang menjadi dokumen kebijakan anggaran. Informan yang akan menjadi sumber data peneliti dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

Tabel 3.1 Informan dalam Penelitian

Unsur	Jumlah	Tingkatan	Keterangan
Bappeda	1	Kabupaten	Perencana

Dinas Sosial	2	Kabupaten	Penyusun Kebijakan
NGO independent	3	Kabupaten/Provinsi	NGO kritis
Total	26	-	-

Sumber: Data penelitian, diolah (2024)

3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengacu Teknik pengumpulan data menurut Creswell (2015:222), terdapat empat tahap. Yakni, wawancara mendalam (depth interview), dokumen, dengan menambahkan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion).

Pengumpulan data terdiri dari dua tahapan, yaitu pengumpulan data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data primer diselenggarakan dengan dua cara. Pertama, melakukan wawancara mendalam pada informan kunci merujuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Bentuknya semiformal, dengan cara wawancara semiterstruktur, yang dikombinasi dengan diskusi bebas, cair, namun tetap mendalam dan bersifat lepas dan terbuka. Sedangkan pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara mengambil sumber-sumber dokumen kebijakan Anggaran dan dokumen perencanaan pembangunan yang mendukung penelitian ini. Misalnya, mengacu dokumen APBD, RPJP, RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD

3.5 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ada tiga, yakni (a) penjadohan pola; (b) pembuatan eksplanasi; dan (c) analisis deret waktu (Yin, 2021: 140). Sedangkan Creswell (2015:277-278), mendukung Stake (1995) dan menambahkan gagasan Yin (2009) menyebutkan, analisis dan penyajian data dalam penelitian studi kasus terdiri lima tahapan, yakni (a) pengelompokan kategorikal; (b) penafsiran langsung; (c) penetapan pola dan menemukan korespondensi (hubungan, keterkaitan); (d) sintesis lintas kasus, jika terdapat dua atau lebih kasus yang dialami; dan (e) generalisasi naturalistik. Merujuk metodologis ini, peneliti memilih lima tahapan (Creswell, 2015:277-278),

BAB IV

HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Obyek Penelitian

1.1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro adalah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan 5 Kabupaten, yaitu dibagian utara dengan Kabupaten Tuban, bagian timur dengan Kabupaten Lamongan, bagian selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, serta bagian barat dengan Kabupaten Blora (Jawa Tengah). Bagian barat Bojonegoro (perbatasan dengan Jawa Tengah) merupakan bagian dari Blok Cepu, salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Pembagian Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, meliputi 11 kelurahan dan 419 desa.

Beberapa hal yang penting kita ketahui berkaitan dengan pengembangan wilayah, dimana wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian, maka dalam konsep pengembangan perlu memperhatikan tentang ketersediaan lahan, letak geografis, jenis tanah, agroklimat, sumber daya wilayah, sarana dan prasarana. Sumber daya dan kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan prospek terhadap perkembangan pembangunan wilayah. Dengan demikian besarnya Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi kepadatan penduduk yang tinggi yaitu mencapai 582,197 jiwa / km² dari total jumlah populasi penduduknya yang mencakup 1.343.164 jiwa dan juga luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro, maka secara demografis dikategorikan cukup besar (BPS, 2024).

1.2. Gambaran Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro

Aktivitas ekonomi penduduk di Kabupaten Bojonegoro didominasi dari sektor industri pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,82 %, Pertambangan dan penggalan sebesar 54,29 %, Industri pengolahan 5,69 %, Listrik dan Gas 0,02 %, Pengadaan Air, Pengelolaan sampah limbah dan daur ulang 0,03%, Konstruksi 6,42%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor 7,81%, Transportasi dan pergudangan 1,15%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

0,89%, Informasi dan Komunikasi 5,46%, Jasa Keuangan dan Asuransi 1,23%, Real Estat 1,04%, Jasa Perusahaan 0,12%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3,19%, Jasa Pendidikan 0,85%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,37%, dan Jasa lainnya sebesar 0,63% (BPS, 2022). Berdasarkan dukungan aktivitas ekonomi tersebut, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Bojonegoro per tahun 2022 mencapai Rp 76.413.000,00. Pada satu sisi, capaian pembangunan manusia dikabupaten Bojonegoro dikategori tinggi dibandingkan pada tahun 2021 dengan nilai 70,12, akan tetapi Kabupaten Bojonegoro dalam peringkat pembangunan manusia di Jawa Timur masih dikategorikan rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan di Kabupaten Bojonegoro masih dikatakan belum kondusif dalam kestabilan sosial-ekonomi. Sehingga, capaian pembangunan sosial-ekonomi tersebut belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang riil bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Hal ini terlihat dari capaian beberapa indikator kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan masih rendah seperti yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Indikator Pengentasan Kemiskinan

No	Indikator Pengentasan Kemiskinan	Capaian Hasil
1	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	471,457
2	Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribu)	147,33
3	Persentase Penduduk Miskin	11,69
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,99
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,48

Sumber : BPS, Kabupaten Bojonegoro dalam angka 2024.

Sebagaimana table di atas menunjukkan bahwa capaian pada indikator masih rendah dengan tingginya kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 yang mencapai 11,69% dengan angka kemiskinan tertinggi ke-11 di provinsi Jawa Timur.

2. Hasil Penelitian

2.1. Kebijakan Kabupaten Bojonegoro

2.1.1. Perda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro

Kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, secara spesifik, sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Perda 6/2015 ini mengatur berbagai ketentuan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan di daerah, mulai dari pendataan dan pengelolaan basis data kemiskinan, pendekatan dan strategi penanggulangan kemiskinan, pendanaan hingga keterlibatan berbagai kelompok kepentingan. Berdasarkan perda 6/2015, penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada pendekatan pengembangan dan penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemenuhan hak dasar masyarakat miskin, antara lain:

1. Hak memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan.
2. Hak memperoleh pelayanan kesehatan.
3. Hak memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabat warga miskin.
4. Hak mendapat perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri, dan keluarga sesuai karakter budaya setempat.
5. Hak mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial alam membangun, mengembangkan dan memberdayakan diri, dan keluarga sesuai karakter budaya setempat.
6. Hak memperoleh derajat kehidupan yang layak.
7. Hak memperoleh lingkungan hidup yang sehat.
8. Hak meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.
9. Hak memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Adapun strategi penanggulangan kemiskinan yang dimandatkan dalam Perda 6/2015, diantaranya meliputi:

- a) Mengurangi beban pengeluaran warga miskin.
- b) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin.
- c) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan usaha kecil.
- d) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, yang diantaranya harus dijabarkan dalam Renstra OPD (Organisasi perangkat Daerah).

2.1.2. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Perencanaan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bojonegoro terhadap keberpihakan pada orang miskin dapat dilihat dari kebijakan perencanaan pembangunan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). terkait dokumen-dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat sebagaimana data berikut ini:

Visi-Misi pembangunan Bojonegoro jangka panjang, dinyatakan sebagai berikut:

Visi : Pusat Agrobisnis Terkemuka, Berdaya Saing Global dan Berkelanjutan Menuju Jawa Timur Makmur dan Berakhlak.
Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah daerah menetapkan beberapa misi berikut:

Misi : 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan.
2. Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis industri migas dan agribisnis terpadu.
4. Mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai pusat rujukan kesehatan dan pendidikan bagi wilayah sekitar.
5. Mengembangkan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah.
6. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang menjamin ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan.
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang profesional, akuntabel dan demokratis.

Melalui dokumen RPJPD, Pemerintah Bojonegoro juga menyampaikan target penurunan kemiskinan Bojonegoro, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJPD:

Tabel 4.2 Target Penurunan Kemiskinan dalam RPJP Kabupaten Bojonegoro, 2005-2025

Tahun Periode	Target Penurunan Kemiskinan
2005 - 2010	18,78%
2010 - 2015	10,30%
2015 - 2020	9,10%
2020 - 2025	8,25%

Sumber: Dokumen RPJPD Bojonegoro, Tahun 2013-2025

Dalam dokumen RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025, isu kemiskinan dan pengangguran, termasuk juga peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, telah masuk dalam isu-isu strategis daerah. Dengan demikian, kemiskinan sebenarnya sudah menjadi fokus utama prioritas pembangunan Bojonegoro untuk jangka panjang 20 tahun kedepan. Bahkan dinyatakan dalam RPJPD Bojonegoro, sebagai Langkah serius, untuk menangani masalah kemiskinan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sebagaimana disampaikan oleh ibu wiwik dari Bappeda menyatakan bahwa;

Pemda mengarahkan prinsip pelaksanaan pembangunan ekonomi haruslah *pro-poor* (pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin), *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment* (berwawasan lingkungan). Pembangunan akan diarahkan untuk penurunan kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh akses dalam menikmati pelayanan dasar yang menjadi hak seluruhwarga negara.

Selain itu, dari hasil telaah dokumen RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025, secara umum dapat dikatakan bahwasanya isu kemiskinan telah menjadi fokus utama rencana pembangunan jangka panjang, ini didasarkan dari hasil jawaban dari beberapa instrument (pertanyaan) kunci di atas, antara lain:

Tabel 4.3 Instrumen dan Indikator Penilaian Dokumen RPJPD Kab. Bojonegoro Tahun 2013-2025

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
01.	Apakah kemiskinan menjadi bagian isu prioritas daerah	√		Dinyatakan dalam bagian isu-isu strategis daerah (No. 6)
02.	Apakah ada ulasan mengenai profil kemiskinan daerah	√		Terdapat ulasan singkat.
02.	Apakah isu pengentasan kemiskinan ditegaskan dalam tujuan RPJPD?	√		Dinyatakan secara eksplisit pada bagian sasaran dan arah kebijakan pembangunan.

03	Apakah ada program pengentasan kemiskinan termuat pada setiap tahapan RPJP tersebut?	√		Ada, tetapi sangat umum
04	Apakah disebutkan target capaian pengurangan kemiskinan pada setiap tahapan tersebut?	√		Dinyatakan setiap tahun periode (5 tahunan).

Sumber: Hasil analisis dokumen RPJPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025

Sebagaimana dalam dokumen RPJPD, Pemerintah Bojonegoro melalui Dokumen RPJMD 2019-2023 dan RPJM antara 2023-2025 juga menyampaikan berkomitmen dalam pengentasan kemiskinan Bojonegoro, sebagaimana ditetapkan data berikut,:

Tabel 4.4 Instrumen dan Indikator Penilaian Dokumen RPJMD Kab. Bojonegoro Tahun 2019-2023 dan 2023-2025

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya	Tidak	
01.	Apakah ada ulasan mengenai profil kemiskinan daerah?	√		Ada, tetapi sangat singkat.
02.	Apakah kemiskinan menjadi bagian isu prioritas daerah?	√		Dinyatakan dalam isu-isu strategis daerah.
01.	Apakah Visi dari RPJMD menegaskan terwujudnya kesejahteraan seluruh masyarakat?	√		Terandung dalam makna kata, “Sejahtera”
02.	Apakah Misi dari RPJMD menegaskan pengentasan masyarakat miskin?	√		Dinyatakan dalam misi ke-4 dan secara implisit di misi ke-5.
03	Apakah strategi dasar pembangunan dalam RPJMD menegaskan prinsip pemerataan kesejahteraan masyarakat?	√		Dinyatakan secara implisit
04	Apakah arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD menegaskan perwujudan kesejahteraan sosial?	√		
05	Apakah disebutkan target capaian pengurangan kemiskinan pada setiap tahapan tersebut?	√		
06	Apakah program pembangunan dalam RPJMD menyebutkan beberapa program yang sasarannya kelompok masyarakat miskin?	√		

Adapun untuk target pengentasan kemiskinan setiap tahun periode pembangunan, sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2019-2023, baik sebelum dan sesudah perubahan, sebagai berikut:

Tabel 4.5 Target Pengentasan Kemiskinan Menurut RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2023

Tahun	Target RPJMD Awal	Target RPJMD Perubahan	Realisasi Capaian
2019	13,50% - 13,15%	-	12,38%
2020	13,15% - 12,70%	-	12,87%
2021	12,70% - 12,30%	12,50% - 11,95%	13,27%
2022	12,30% - 11,95%	11,95% - 11,55%	12,21%
2023	11,95% - 11,88%	11,55% - 11,00%	-

Sumber: RPJMD Bojonegoro 2019-2023, sebelum dan setelah perubahan.

2.2. APBD Kabupaten Bojonegoro

Anggaran Daerah merupakan suatu rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen yang mencakup anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yang disusun selama setahun sebelum pelaksanaan program yang tertera di dokumen tersebut. Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (8) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD adalah daftar sistematis yang berisi rencana keuangan tahunan Pemda (Pemerintah Daerah). APBD memuat pendapatan suatu daerah dan pengeluaran yang telah disetujui oleh DPRD untuk kurung waktu satu tahun lamanya.

Dokumen APBD berisikan tentang Pendapatan daerah, Belanja daerah dan Pembiayaan daerah, untuk pendapatan daerah sendiri ada beberapa kategori, yang pertama ada pendapatan asli daerah di mana sumbernya dari pajak atau retribusi, yang kedua ada pendapatan transfer yaitu pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan antardaerah, yang ketiga ada lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain pendapatan daerah ada juga belanja daerah yang bermula dari

belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer, serta ada pembiayaan daerah tentang silpa (sisa lebih pendapatan) tahun lalu.

2.2.1. Pendapatan Kabupaten Bojonegoro

Pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro yang ada dalam APBD tahun anggaran 2024 sebesar RP 5.4 triliun, pendapatan daerah tersebut bersumber tiga pendapatan yakni Pendapatan asli daerah, Pendapatan transfer dan pendapatan Lain-lain yang sah sebagaimana Gambar grafik dibawah ini :

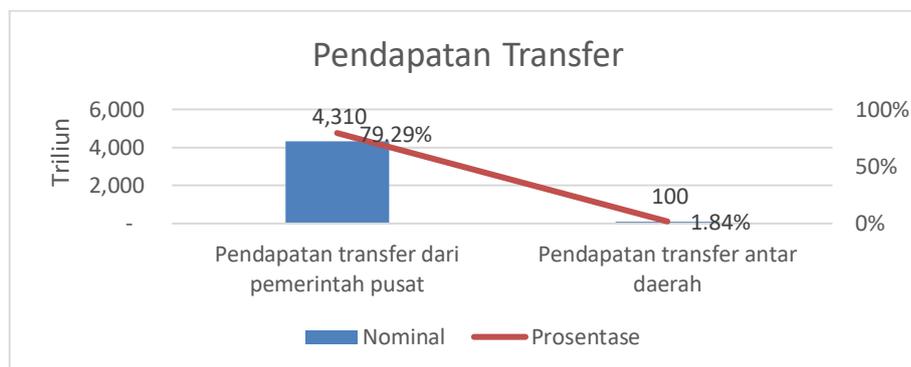
Gambar 4.1 Pendapatan Kabupaten Bojonegoro



Sumber : APBD 2024 (diolah)

Sebagaimana gambar Grafik diatas menunjukkan bahwa Pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro tertinggi dari sumber pendapatan Transfer dari pemerintah Pusat yaitu sebesar Rp.4.41 triliun atau mencapai 81,13 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro, sementara sumber pendapatan lainnya sangat kecil yaitu sebesar Rp,950 Milyar dari sumber Pendapatan Asli Daerah atau hanya menyumbang 17,48 persen dari total pendapatan kabupaten Bojonegoro dan sumber pendapatan yang ketiga dari Lain-lain Pendapatan yang Sah menyumbang paling kecil yakni hanya Rp.75 Milyar atau 1.39 persen. Besarnya sumber pendapatan daerah dari pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan antar daerah sesuai dengan grafik dibawah ini:

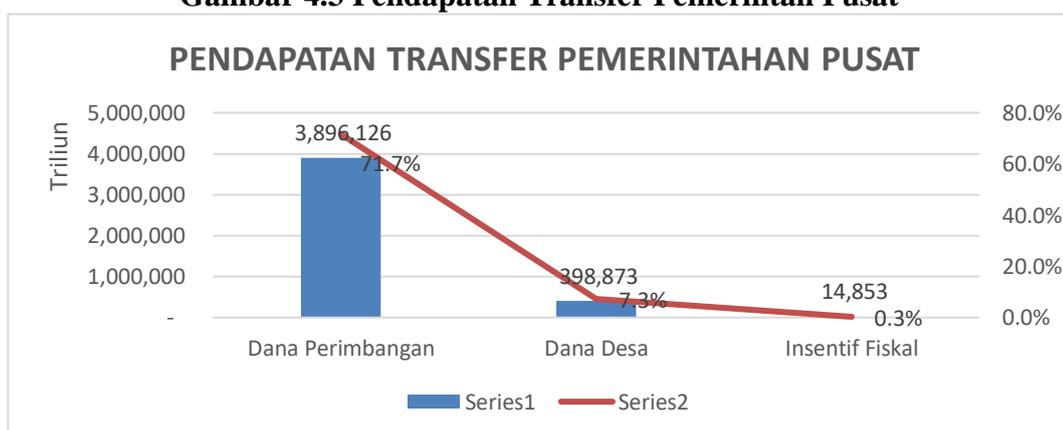
Gambar 4.2 Pendapatan Transfer Kabupaten Bojonegoro



Sumber : APBD 2024 (diolah)

Sebagaimana gambar Grafik diatas menunjukkan bahwa pendapatan transfer dengan sumber terbesar berasal dari pemerintah pusat mencapai Rp.4.3 Triliun atau sebesar 79,29 persen dari total keseluruhan pendapatan daerah, sementara Pendapatan transfer antar daerah hanya sebesar Rp.100 Milyar atau hanya 1,84 Persen. Rincian sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat terdiri dari sumber pendapatan perimbangan, dari dana desa dan insentif fiskal, masing senilai Rp.3,6 dari dana perimbangan, Rp.398 Milyar dari dana desa, dan Rp.14 Milyar dari insentif fiskal sebagaimana gambar 3 dibawah ini:

Gambar 4.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

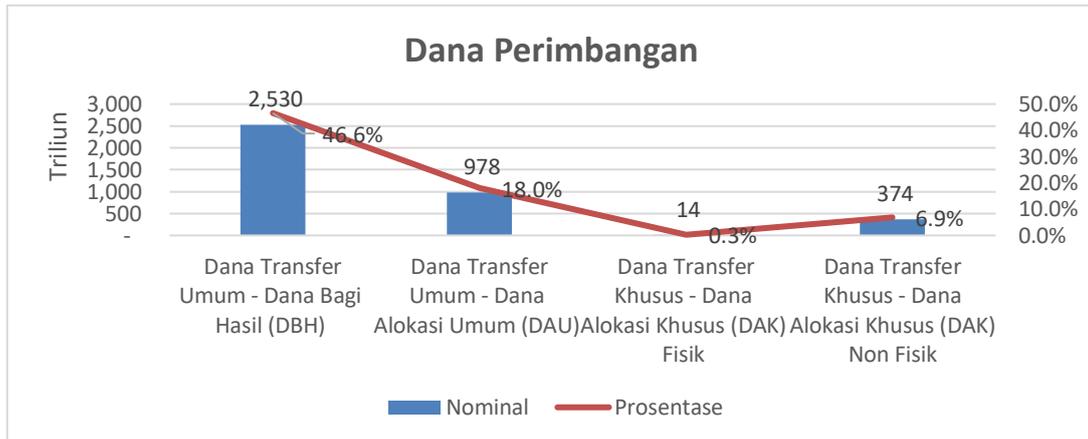


Sumber : APBD 2024 (diolah)

Dana Perimbangan yang transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari beberapa sumber dana perimbangan yakni dari dana transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan non

Migas, juga dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik untuk Fisik dan Non Fisik sebagaimana rincian gambar 4 di bawah ini:

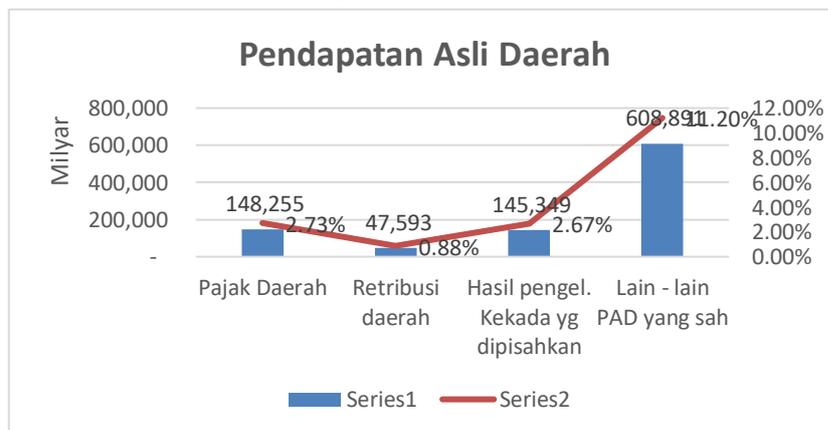
Gambar 4.4



Sumber : APBD 2024 (diolah)

Selain pendapatan transfer yang menjadi pendapatan terbesar, Kabupaten Bojonegoro melalui kinerja pendapatannya yaitu dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.950 Milyar, yang bersumber dari pendapatan pajak daerah Rp.148 Milyar, retribusi daerah senilai Rp.47 Milyar, dan dari sumber hasil perusahaan milik daerah atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp.145 Milyar. Sementara terbesar Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro dari sumber Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang mencapai Rp.608 Milyar atau senilai 11,20 persen dari total pendapatan asli daerah, seperti yang terinci pada gambar grafik PAD Bojonegoro berikut ini:

Gambar 4.5



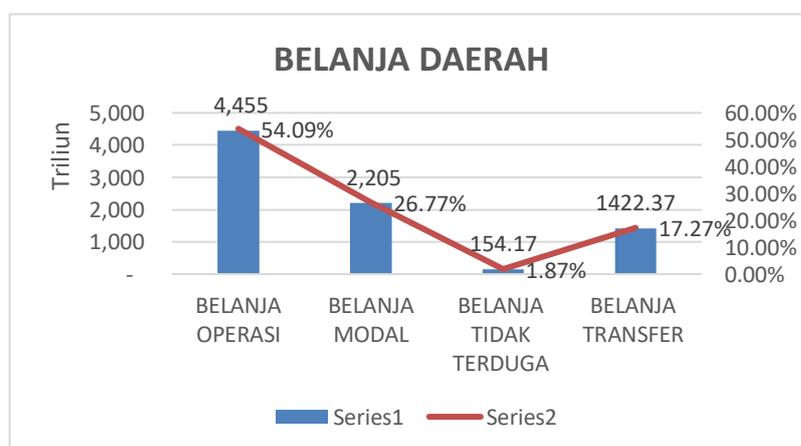
Sumber : APBD 2024 (diolah)

PAD dari Pendapatan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro yang mencapai Rp.608 berasal dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian. Namun 54 persen dari Pendapatan BLUD Kabupaten Bojonegoro berasal dari pendapatan tiga Rumah Sakit yang dikelola pemerintah Kabupaten Bojonegoro yakni sebesar Rp. 508 Milyar.

2.2.2. Belanja Kabupaten Bojonegoro

Kebijakan Belanja APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 ini yang berjumlah sebesar Rp.8.2 Triliun, dari total belanja tersebut dialokasi untuk belanja belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer seperti yang tertera pada gambar grafik dibawah ini:

Gambar 4.6



Sumber : APBD 2024 (diolah)

Berdasarkan gambar grafik diatas, belanja operasi menjadi belanja tertinggi Kabupaten Bojonegoro yakni berjumlah Rp.4,4 triliun atau sebesar 54,09% dari total keseluruhan belanja daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja operasi dialokasikan untuk Belanja pegawai sebesar Rp.1.850 Triliun atau sebesar 22,46 persen, Belanja Barang dan Jasa 1,677 Triliun atau sebesar 20,36

persen, dan Belanja Belanja Hibah sebesar Rp.803 Miliar, sementara dua belanja lainnya sangat kecil seperti Belanja Bantuan Sosial hanya Rp.122 Miliar atau hanya 1,49 persen, dan belanja subsidi sebesar Rp.2 Miliar atau hanya 0,02 persen sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

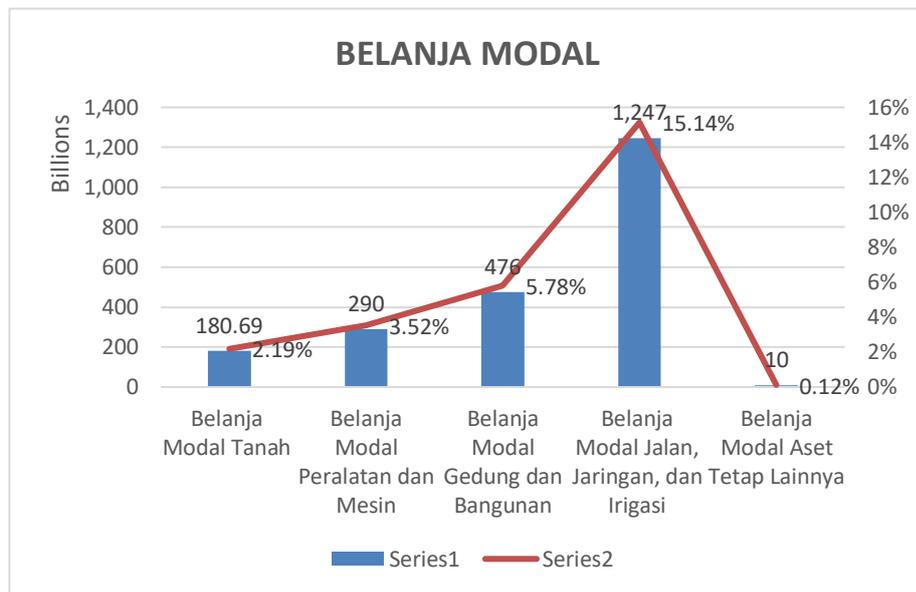
Tabel 4.2 Belanja Operasi APBD Bjonegoro

BELANJA OPERASI	4.454.681.492.069	54,09%
Belanja Pegawai	1.849.477.129.751	22,46%
Belanja Barang dan Jasa	1.677.180.087.564	20,36%
Belanja Subsidi	2.000.000.000	0,02%
Belanja Hibah	803.208.620.654	9,75%
Belanja Bantuan Sosial	122.815.654.100	1,49%

Sumber: APBD Bojonegoro (diolah)

Selain Kebijakan alokasi belanja operasi, Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan kebijakan Belanja Modal sebesar Rp.2.204 Triliun. Besaran Belanja Modal tersebut yang tertinggi digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp.1,247 Triliun atau mencapai 15,14 persen dari total belanja modal Kabupaten Bojonegoro, kedua digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 476 Miliar atau sebesar 5,78 persen dari belanja operasi, selainnya digunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya seperti yang tertera pada gambar grafik dibawah ini :

Gambar 4.7



Sumber: APBD Bojonegoro (diolah)

Selain Belanja operasi dan belanja modal, juga terdapat belanja tak terduga dan belanja transfer, masing senilai Rp.154 Miliar untuk belanja tak terduga dan belanja transfer sebesar 1,4 Triliun untuk dialokasikan belanja bagi hasil ke desa dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan APBD Kabupaten Bojonegoro diproyeksikan desfisit sebesar Rp.2.799 Triliun. guna menutup defisit dimaksud Kabupaten Bojonegoro menutupnya dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya yang setiap tahun sangat tinggi yakni sebesar RP.3.334 Triliun.

2.3. Program Kebijakan dan Belanja Dinas Sosial

Dinas Sosial mengidentifikasi Permasalahan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, khususnya urusan Sosial dalam tiga masalah utama pengentasan kemiskinan yaitu pertama, kurangnya akurasi data PMKS dan kemiskinan, kedua, terbatasnya aksesibilitas, sarana prasarana pelayanan menangani PMKS (PPKS) dan pemberdayaan partisipasi

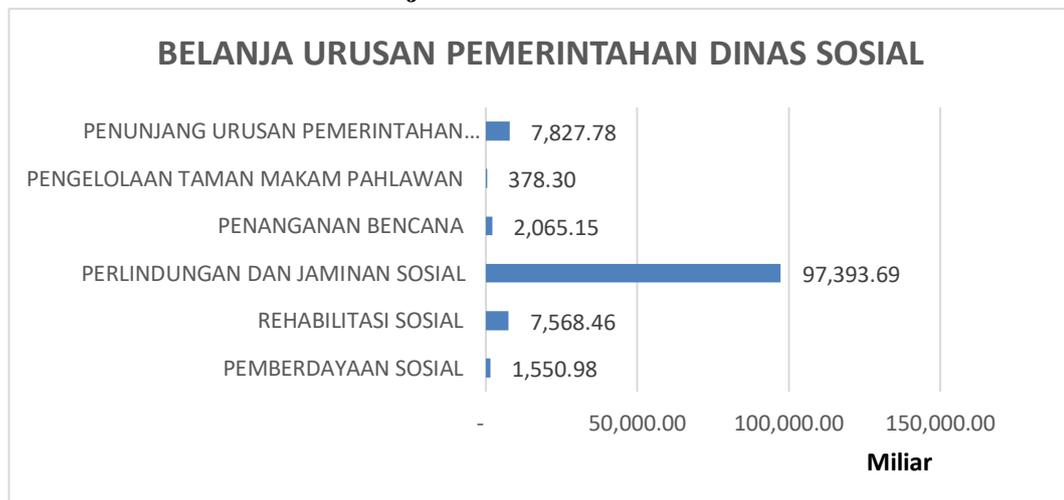
masyarakat (PSKS) dan ketiga, kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin dalam penanganan belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan

Belanja urusan pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2024 telah diatur dalam beberapa program kerja utama yang masing-masing memiliki alokasi anggaran tersendiri. Dari total anggaran yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan Dinas Sosial ini adalah Rp 116.784.355.040. menurut kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Achmad Syoleh Fatoni;

Alokasi ini mencakup berbagai program yang dirancang untuk memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan.

Dinas Sosial sebagai *Leading Sector*, mencanangkan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bisa peneliti temukan dalam dokumen APBD Kabupaten Bojonegoro di tahun 2024:

Gambar 4.8 Belanja Urusan Pemerintahan Dinas Sosial



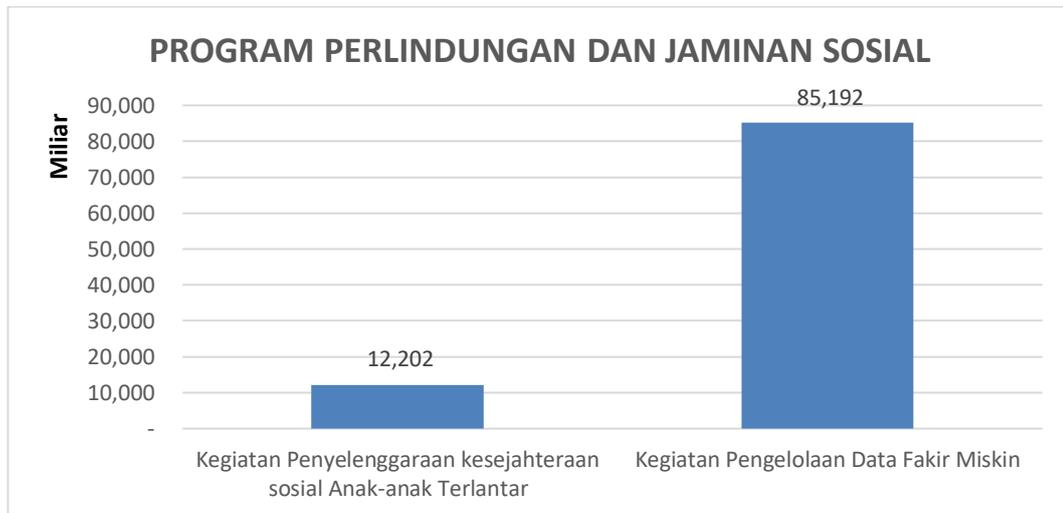
Sumber : APBD Dinas Sosial (diolah)

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial mendapat alokasi anggaran terbesar, yaitu Rp 97.393.686.355 atau 83,40% dari total anggaran Dinas Sosial. Program ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat

yang paling rentan, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Fokus utama dari program ini adalah memastikan bahwa mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi paling sulit mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dibelanjakan untuk dua kegiatan utama yaitu pertama, untuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak-anak terlantar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.202.168.000, atau 10,45% dari total anggaran program tersebut, serta yang kedua untuk kegiatan pengelolaan data fakir miskin dengan alokasi anggaran Rp 85.191.518.355 atau 72,95%. Untuk kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak-anak terlanta mencakup beberapa sub-kegiatan, diantaranya sub-kegiatan Penjangkauan anak-anak terlantar yang mendapatkan anggaran sebesar Rp 12.055.450.000 atau 10,32%., serta sub-kegiatan untuk Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar dengan alokasi Rp 146.718.000 atau 0,13%. Sementara Kegiatan terbesarnya untuk kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp 85.191.518.355 atau 72,95%. Kegiatan ini membiayai Sub-kegiatan Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota mendapatkan anggaran Rp 30.363.000 atau 0,03%, dan sub-kegiatan Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota memiliki alokasi terbesar yaitu Rp 84.286.075.123 atau 72,17%. Selain duat ada sub-kegiatan di atas kegiatan ini juga untuk membiayai Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga yang mendapat anggaran sebesar Rp 875.080.232 atau 0,75%. Secara lebih jelas berikut grafik penggunaan anggaran program perlindungan dan Jaminan Sosial:

Grafik 4.9 program perlindungan dan Jaminan Sosial



Selain untuk pengelolaan data fakir miskin yang sangat besar, anggaran terbesar Dinas Sosial kedua untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan anggaran mencapai Rp. 7.827.780.035 atau sebesar 6,70 persen, besarnya anggaran program ini terbesar dialokasikan untuk belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mencapai Rp.5.538.487.298 atau menyerap sebesar 4,74 persen dari total belanja Dinas Sosial.

2.3.1. Akselerasi Ekonomi Rumah Tangga Miskin

Besarnya untuk Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin menggerus kegiatan mengakselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan Akses Peningkatan Pendapatan keluarga, misalnya dalam Program Pemberdayaan Sosial untuk kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.179.895.000 atau hanya 0,15 persen dari Anggaran Dinas Sosial, pada Program Rehabilitasi Sosial, anggaran untuk Penyediaan Permakanan kelompok disabilitas hanya Rp. 219.470.500 atau 0,19 persen dari Anggaran Dinas Sosial, dan Permakanan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hanya sebesar Rp.171.343.500 atau 0,15 persen dari anggaran Dinas Sosial

Tabel 4.2 Belanja Pemberdayaan Dinas Soal

Kegiatan	Nominal Anggaran	%
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	179.895.000	0,15%
Penyediaan makan untuk Disabilitas	219.470.500	0,19%
Penyediaan Alat Bantu	55.980.000	0,05%
Penyediaan makan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	171.343.500	0,15%
Penyediaan Makanan bencana	80.214.600	0,07%
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	887.966.100	0,76%

Dinas Sosial Melalui Bapak Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Achmad Syoleh Fatoni menyatakan;

Untuk program kegiatan khusus penguatan ekonomi menjadi urusan Dinas Perekonomian, jadi Dinas Soal lebih pada pemberian bantuan yang bersifat vilantropi belum berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin

2.3.2. Anggaran untuk mengurangi Belanja Orang Miskin dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar RTM

Pemenuhan Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan merupakan kewajiban negara kepada masyarakat, khususnya kepada Rumah tangga Miskin. Dinas Sosial melalui Bapak Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Achmad Syoleh Fatoni menyatakan tidak secara khusus menyelenggarakan urusan tersebut, karena masing-masing urusan diserahkan kepada Dinas terkait.

Sementara alokasi anggaran untuk mengurangi Belanja Orang Miskin dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar RTM pada belanja Dinas Sosial yang bisa

dicermati dalam APBD Nilainya cukup kecil, Misalnya Belanja Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial sebesar Rp. 6.198.078.400 atau sebesar 5,31 persen dari beanja Dinas Sosial, selain itu juga dialokasikan untuk belanja kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan anggaran Rp.109.538.000 anggaran ini bahkan cukup kecil hanya sebesar 0,09 persen dari beanja Dinas Sosial.

Ada juga anggaran untuk kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar nilai hanya mencapai Rp. 20.310.000 atau 0.02 persen dari beanja Dinas Sosial. Di dalam belanja Dinas Sosial tidak terdapat anggaran untuk jaminan pemenuhan kesehatan bagi Rumah Tangga Miskin maupun untuk bantuan Rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Berikut ini adalah anggaran program kegiatan yang terkait dengan bimbingan dan anggaran layanan pendidikan Dasar bagi Warga miskin yang di buat oleh Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro

Tabel 4.3 Belanja Bimbingan dan Layanan Pendidikan Dinas Soal

KEGIATAN	NOMINAL	%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	6.198.078.400	5,31%
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	109.538.000	0,09%
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	20.310.000	0,02%

3. Pembahasan

3.1. Kebijakan Kabupaten Bojonegoro

Komitmen Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2005-2025, isu kemiskinan dan pengangguran, termasuk juga peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, telah masuk dalam isu-isu strategis daerah. Dengan demikian, kemiskinan sebenarnya sudah menjadi fokus utama prioritas pembangunan Bojonegoro untuk jangka panjang. Bahkan dinyatakan dalam RPJPD Bojonegoro, sebagai langkah serius, untuk

menangani masalah kemiskinan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Pemda mengarahkan prinsip pelaksanaan pembangunan ekonomi haruslah *pro-poor* (pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin), *pro-job*, *pro-growth*, dan *pro-environment* (berwawasan lingkungan). Pembangunan akan diarahkan untuk penurunan kemiskinan dengan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memperoleh akses dalam menikmati pelayanan dasar yang menjadi hak seluruh warga negara.

Hal ini dapat diverifikasi oleh peneliti dalam dokumen Misi Kabupaten Bojonegoro baik dalam RPJP maupun dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro yakni Komitmen untuk Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan keimanan dan ketakwaan, Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing. Dan komitmen meningkatkan perekonomian berbasis industri migas dan agribisnis terpadu. Serta komitmen untuk mengembangkan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mendukung pengembangan ekonomi wilayah.

Selain Komitmen dalam Misi, isu Strategis maupun Program prioritas, kabupaten Bojonegoro sudah membuat target penurunan Angka kemiskinan misalnya target penurunan kemiskinan di tahun 2015-2020 seharusnya angka kemiskinan bisa 9, 10 persen dari jumlah penduduk kabupaten Bojonegoro, di tahun 2020 hingga 2025 angka kemiskinan hanya 8,25 persen dari jumlah penduduk. Namun komitmen dalam dokumen perencanaan ini saja menurut peneliti tidak cukup, perlu konsistensi dalam mengalokasikan Anggaran APBD khususnya keperpihakan anggaran untuk orang miskin di Bojonegoro. Temuan peneliti target penurunan Kemiskinan oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro tidak tercapai ditahun 2024 ini saja angka kemiskinan masih di angka 11,69 persen dari jumlah penduduk kabupaten Bojonegoro.

3.2. APBD Kabupaten Bojonegoro

selama tahun 2019-2024, proporsi pendapatan dalam APBD Kabupaten Bojonegoro didominasi pendapat dari dana perimbangan – dana transfer dari pemerintah pusat – dengan rata-rata 75,04 persen bahkan di tahun 2024 mencapai

81,13 persen dari total pendapatan APBD kabupaten Bojonegoro. Sementara rata-rata PAD hanya berkisar 16,8 persen, dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah rata-rata hanya berkisar 7,84 persen. komponen PAD pada APBD Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2019-2024 sangat didominasi sumber pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah. Proporsi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah tertinggi. Dimana sumber pendapatan Lain-lain PAD yang Sah dalam PAD itu terbesar bersumber dari BLUD atau pendapatan Rumah Sakit yang didapat dari pelayanan orang sakit. Hal ini tentu bertolak belakang dari komitmen pemerintah kabupaten Bojonegoro untuk memberikan jaminan masyarakat khususnya rumah tangga miskin untuk mendapatkan jaminan pelayanan dasar Kesehatan, malah menjadi tumpuan pendapatan asli Daerah.

Sementara komponen PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada di urutan ketiga dan keempat. Proporsi Pajak Daerah pada PAD, masing-masing hanya sebesar 16% dan 14%, mestinya komponen Pajak Daerah haruslah menjadi komponen utama pendapatan Asli Daerah karena ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang baik. Selain Pendapatan APBD yang tidak memberatkan Masyarakat, perlu dilihat sejauhmana konsistensi belanja Pemerintahan kabupaten Bojonegoro atas rencana strategis yang tertuang dalam Dokumen perencanaan di atas.

Kebijakan Belanja APBD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 ini yang berjumlah sebesar Rp.8.2 Triliun, dari total belanja tersebut dialokasi untuk belanja belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Dalam APBD Kabupaten Bojonegoro, Belanja operasi yang tidak terkait langsung dengan belanja pemenuhan pelayanan publik ternyata ternyata menjadi belanja tertinggi yaitu berjumlah Rp.4,4 triliun atau sebesar 54,09% dari total keseluruhan belanja daerah. Alokasi Belanja Operasi tersebut digunakan untuk Belanja pegawai sebesar Rp.1.850 Triliun atau sebesar 22,46 persen, hal menunjukkan pemerintahan Kabupaten Bojonegoro tidak konsisten dalam menyusun perencanaan Pembangunan dengan perencanaan anggaran. dimana seharusnya yang menjadi prioritas utama belanja daerah seharusnya bukan belanja gaji pegawai namun harus diperuntukkan

untuk belanja pelayanan publik yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Selain Kebijakan alokasi belanja operasi yang tertinggi untuk belanja gaji pegawai, pemerintahan Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan kebijakan Belanja Modal sebesar Rp.2.204 Triliun. Dari struktur komposisi alokasi belanja Modal bisa kita lihat bahwa yang tertinggi digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp.1,247 Triliun atau mencapai 15,14 persen dari total belanja modal, kedua digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan fasilitas Publik sebesar 476 Miliar atau sebesar 5,78 persen dari belanja Modal, Kebijakan belanja modal ini menunjukkan bahwa Pemerintah kabupaten Bojonegoro masih Fokus pada pembangunan Infrastruktur publik, belanja pemberdayaan ekonomi dan pemenuhan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan belum menjadi focus utama dan terbesar dalam alokasi APBD

3.3. Program Kebijakan dan Belanja Dinas Sosial

Komitmen Dinas Sosial dalam pengentasan kemiskinan dapat kita telusuri dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah, khususnya urusan Sosial, kemitmennya sudah sangat baik dimana dalam mengidentifikasi masalah utama sudah terkait pengentasan kemiskinan yaitu pertama, kurangnya akurasi data PMKS dan kemiskinan, kedua, terbatasnya aksesibilitas, sarana prasarana pelayanan menangani PMKS (PPKS) dan pemberdayaan partisipasi masyarakat (PSKS) dan ketiga, kebijakan penggunaan data basis keluarga miskin dalam penanganan belum secara operasional dipergunakan sebagai intervensi program pengentasan kemiskinan

Namun komitmen perencanaan pembangunan di atas kurang konsisten dalam menyusun kebijakan belanja Dinas Sosial, Dari total anggaran yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan Dinas Sosial ini adalah Rp

116.784.355.040. digunakan untuk membiayai program perlindungan dan Jaminan Sosial terbesar, yaitu Rp 97.393.686.355 atau 83,40% dari total anggaran Dinas Sosial, tujuan program tersebut sekilas sangat baik yaitu menyediakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang paling rentan, termasuk lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin.

Namun penelusuran peneliti kegiatan apa dalam program perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut, ternyata untuk kegiatan pengelolaan data fakir miskin dengan alokasi anggaran Rp 85.191.518.355 atau 72,95 dari total belanja Dinas Sosial. Selain untuk pengelolaan data fakir miskin yang sangat besar, anggaran terbesar Dinas Sosial kedua untuk belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang mencapai Rp.5.538.487.298 atau menyerap sebesar 4,74 persen dari total belanja Dinas Sosial. Hal ini menunjukkan Fokus utama masih Menyusun dan mengelola data dan gaji pegawai, Dinas Sosial belum bisa menjalankan kegiatan yang dapat memastikan masyarakat yang dalam kondisi sosial dan ekonomi paling sulit bisa mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidupnya.

3.3.1. Akselerasi Ekonomi Rumah Tangga Miskin

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Sosial belum memprioritaskan alokasi anggaran untuk Akselerasi rumah tangga miskin. Besarnya alokasi anggaran Dinas untuk Kegiatan Pengelolaan data Fakir Miskin menggerus alokasi kegiatan lainnya. Belanja untuk Program kegiatan mengakselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM) masih sangat minim dan jauh dari kata cukup. Belanja dinas untuk mendapatkan Akses Peningkatan Pendapatan keluarga miskin dalam Program Pemberdayaan Sosial hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.179.895.000 atau hanya 0,15 persen dari Anggaran Dinas Sosial, pada Program Rehabilitasi Sosial, anggaran untuk Penyediaan makanan kelompok disabilitas hanya Rp. 219.470.500 atau 0,19 persen, sementara biaya makan untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hanya sebesar Rp.171.343.500 atau 0,15 persen dari anggaran Dinas Sosial

3.3.2. Anggaran untuk mengurangi Belanja Orang Miskin dalam pemenuhan Kebutuhan Dasar RTM

Pada belanja anggaran untuk pemenuhan pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan juga terjadi hal yang sama dengan anggaran akselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin di atas, Pelayanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perumahan yang menjadi kewajiban Negara kepada masyarakat, khususnya kepada Rumah tangga Miskin juga belum menjadi prioritas utama pada belanja Dinas Sosial kabupaten Bojonegoro, Nilainya belanjanya masih cukup kecil dan terbatas, dibidang Pendidikan masih relatif tinggi meski tidak sebanding dengan besarnya APBD Kabupaten Bojonegoro, misalnya, ada Belanja Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial dibandingkan belanja untuk RTM lainnya masih lebih besar yakni Rp. 6.198.078.400 atau sebesar 5,31 persen dari beanja Dinas Sosial.

Namun untuk belanja kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat dengan anggaran Rp.109.538.000 anggaran ini bahkan cukup kecil hanya sebesar 0,09 persen dari beanja Dinas Sosial. Bahkan anggaran untuk kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar nilai hanya mencapai Rp. 20.310.000 atau 0.02 persen dari beanja Dinas Sosial. Dalam kebijakan belanja Dinas Sosial tidak terdapat anggaran untuk jaminan pemenuhan kesehatan bagi Rumah Tangga Miskin maupun untuk bantuan Rumah layak huni bagi masyarakat miskin yang ada hanya bantuan alat kesehatan untuk disabilitas dengan nilai anggaran yang cukup kecil.

BAB IV

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Sebagaimana data penelitian dan hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada dasarnya sudah memiliki komitmen dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan baik perencanaan 20 tahun yang ada dalam dokumen RPJPD, maupun dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan dalam dokumen RPJMD kabupaten Bojonegoro maupun dalam rencana kerjas tahunan amupun rencana Aksi tahunannya, bahkan pemerintah kabupaten Bojonegoro sudah membuat target penurunan angka kemiskinan tahunan,

Namun dari data dan hasil pembahasan menunjukkan target tersebut tidak tercapai, hal ini disebabkan pemerintah Kabupaten Bojonegoro kurang konsisten dalam membuat kebijakan pengelolaan APBD, dimana belanja Gaji masih sangat mendominasi, dengan jumlah yang lebih tinggi dibandingkan belanja prioritas pengurangan kemiskinan sebagaimana yang dibuat dalam perencanaan pembangunan. Selain belanja Gaji, fokus utama pemerintah masih pembangunan infrastruktur belum pada belanja langsung yang memiliki dampak pada pengurangan angka kemiskinan dengan mengakselerasi ekonomi Rumah Tangga Miskin, dan alokasi anggaran untuk mengurangi belanja orang miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar Rumah tangga miskin yang masih sangat kecil pada belanja Dinas Sosial kabupaten Bojonegoro. Anggaran Dinas Sosial sendiri masih fokus pada tahap pengelolaan data Fakir Miskin, bukan program intervensi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
I	Gaji dan Upah (20%)				
	1.1 Honorarium surveyor	Orang	2	100.000	200.000
	1.2 Honorarium peneliti	Orang	1	300.000	300.000
II	Bahan Habis Pakai dan Peralatan (40%)				
	2.1 Kertas HVS 80 gr	Rim	2	65.000	130.000
	2.2 Foto copi	Lembar	1740	500	870.000
III	Perjalanan (20%)				
	3.1 Perjalanan ke kecamatan penelitian	Kali	5	50.000	250.000
	3.2 Perjalanan kecamatan penelitian	Kali	5	50.000	250.000
IV	Biaya Lain-lain (20%)				
	4.1 Atk (Flasdisk)	Buah	1	100.000	100.000
	4.2 Perjalanan surveyor ke kecamatan	Orang	2	100.000	200.000
	Perjalanan Surveyor ke kecamatan	Orang	2	100.000	200.000
	4.3 Publikasi Jurnal Sinta 4			500.000	500.000
V	Jumlah I, II, III, IV				3.000.000

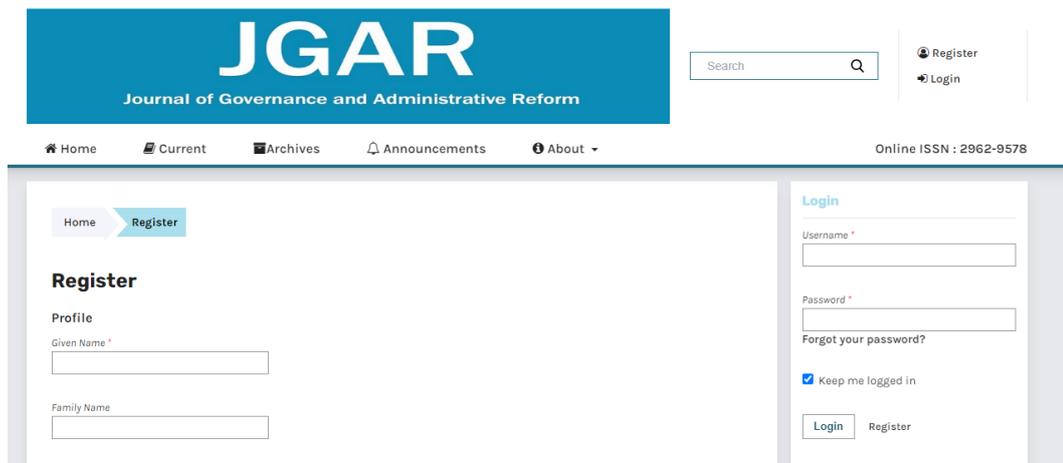
4.2 Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan			
		6	7	8	9
1.	Pengumpulan Data	✓			
2.	Pengolahan Data	✓	✓		
3.	Analisis Data		✓	✓	
4.	Pembuatan Draf Jurnal		✓	✓	
5.	Pembuatan Laporan Hasil Penelitian		✓	✓	
6.	Pengiriman Jurnal		✓	✓	

BAB V TARGET LUARAN

Peneliti menargetkan artikel ilmiah pada penelitian ini dikirim (submit) pada oktober 2024. Artikel publikasi ilmiah akan dikirimkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 5: Journal of Governance and Administrasi Reform (JGAR), Departemen Administrasi Publik FISIP Universitas Airlangga Surabaya, dengan link jurnal: <https://e-journal.unair.ac.id/JGAR/user/register?source=> sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 5.1: Jurnal Ilmiah yang Dituju



The image shows the registration page of the Journal of Governance and Administrative Reform (JGAR). The header features the JGAR logo and the text "Journal of Governance and Administrative Reform". Below the header, there is a navigation menu with links for Home, Current, Archives, Announcements, and About. A search bar is located on the right side of the header. The main content area is divided into two sections: "Register" and "Login". The "Register" section includes a "Profile" section with input fields for "Given Name" and "Family Name". The "Login" section includes input fields for "Username" and "Password", a "Forgot your password?" link, a "Keep me logged in" checkbox, and "Login" and "Register" buttons. The Online ISSN is listed as 2962-9578.

DAFTAR PUSTAKA

Huda Miftahul CSR

OGP

- Berek, Fridolin, 2006, Kumpulan Modul: Pendidikan Politik Anggaran Bagi Warga, BIGS dan Yayasan TIFA, Jakarta
- Creswell, J.W., 2015, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih Di Antara Lima Pendekatan, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta
- Santoso, E.B., Sutikno., Siswanto, V.K., Setyaningsih, Y. (2022). Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD. Sewagati, 7(1):113–129, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.447>.
- Abdul Wahab, Solichin. “Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara” , Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1997.
- Bahagio, Sugeng. Globalisasi Menghempas Indonesia. Jakarta ; LP3ES,2006
- Bungin, Burhan. Metode Penelitian Sosial : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya : Airlangga University Press, 2001.
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta ; Hanindita, 2003. Eko, Sutoro. *Orde Partisipasi Bunga Rampai Partisipasi dan Politik Anggaran*. Jakarta ; Perkumpulan Prakarsa, 2005
- Hadi, Syamsul. *Forum Warga dan Strategi Politik Ekstra Parlementer*. Tuban ; Bina Swagiri dan Fitra Jatim, 2006.
- Hadi, Syamsul. *Partisipasi Semu, Keterlibatan Warga dalam Pembangunan Desa*. Tuban ; Bina Swagiri dan Fitra Jatim, 2004.
- Haryadi, Dedi. *Pendidikan Politik Anggaran Bagi Warga*. Bandung ; Institute of Governance Studies (BIGS), 2006
- Muluk, Saiful. *Musyawaharah Perencanaan Pembangunan*. Bandung ; FPPM, Inisiatif, 2008
- Saputra, Wiko. *Pembangunan Ekonomi dan Terancamnya Hak Dasar Masyarakat, Kritik dan Kajian Terhadap Kebijakan MP3EI 2011-2025*. Jakarta ; Perkumpulan Prakarsa.2014
- Simarmata, Henry Thomas. *Pangan dan Hak Asasi Manusia Dalam Pembangunan*. Jakarta ; Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS), 2011
- Sobari, Wawan. *Membangun Inisiatif Mendorong Perubahan*. Surabaya ; The Asia Foundation, The Jawa Pos Institute of Pro Otonomi, 2007.
- Suaedy, Ahmad. *Kritik Pembangunanisme Telaah Pengetahuan Sebagai Alat Penguasaan*. Jakarta ; CPSM, 1995\
- Sukriyanto, Agus. *Teori dan Isu Pembangunan*. Surabaya ; Untag Press, 2012
- Tjokrowinoto, Moeljarto. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 1996.

Wahab, Abdul. *Menuju Masyarakat Berdaya*. Jombang : Lakpesdam NU, 2008.
Yunianto, Agus. *Sketsa Hak Asasi Manusia Jawa Timur 2000 Penindasan atas Nama Otonomi*. Surabaya ; LBH Surabaya, Pustaka Pelajar Offset, 2001